

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
DANA DESA DI DESA KELISING KEC. SEKATAK KAB. BULUNGAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :  
MARTEN  
NIM. 202141009**

**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS KALTARA**

**TANJUNG SELOR**

**2025**

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Kasus Desa Kelising Kecamatan Sekatak Kab. Bulungan)  
SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh :  
MARTEN  
(202141009)**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KALTARA  
TANJUNG SELOR  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  
Dana Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan

Nama Mahasiswa : Marten

NPM : 202141008

Program Studi : Manajemen

Tim Penguji Skripsi :  
Pembimbing

  
Dedik Wiryawan, S.T., M.M

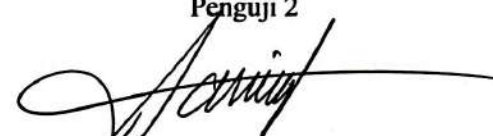
NIDN : 11.191179.01

Penguji 1

  
Rina Sri Wahyuni, S.E., M.Acc

NIDN : 11.200183.03

Penguji 2

  
Yuliansyah, S.Kom., M.M

NIDN : 11.080189.03

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

  
Dewi Qomariah Imelda, M.M. Ak  
NIDN.: 11.050573.02

Ketua Jurusan Manajemen

  
Dedik Wiryawan, S.T., M.M  
NIDN : 11.191179.01

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Skripsi berjudul : **ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA KELISING KEC. SEKATAK  
KAB. BULUNGAN**

Yang disusun oleh **MARTEN**, NPM 202141008 Telah disetujui dan di  
pertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 30 Juli 2025

### TIM PENGUJI

Pembimbing : **Dedik Wiryawan, S.T., M.M**  
NIDN : 11.191179.01

Penguji 1 : **Rina Sri Wahyuni, S.E., M.Acc**  
NIDN : 11.200183.03

Penguji 2 : **Yuliansyah, S.Kom., M.M**  
NIDN : 11.080189.03



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



**Dewi Qomariah Imelda, M.M. Ak**  
NIDN : 11.050573.02

Ketua Jurusan Manajemen



**Dedik Wiryawan, S.T., M.M**  
NIDN : 11.191179.01

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanjung Selor, 30 Juli 2025

Mahasiswa



MARTEN

## **RIWAYAT HIDUP**

Marten , yang lahir pada tanggal 25 April 2001 di Kelising. Merupakan putri kedua dari Bapak Yambur dan Ibu Yangging. Memulai Pendidikan tingkat dasar di SDN 004 Sekatak dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Sekatak , dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah tingkat atas di SMA Negeri 1 Sekatak, dan berhasil menyelesaikan sekolah pada tahun 2021. Setelah tamat sekolah pada tahun 2021 berhasil masuk diperguruan tinggi Universitas Kaltara Tanjung Selor dengan memilih Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Puji Tuhan atas berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus, karena berkat Rahmatnya lah skripsi ini dapat terselesaikan. secara karyawan kecilku ini ku persembahkan kepada*

*Ayahanda tercinta Yambur dan Ibunda Yangging telah melahirkan penulis ke dunia ini dan telah membesarkan serta merawat penulis*

*Dengan penuh cinta dan kasih sayang dan yang selalu tak terhenti*

*Sahabat-sahabatku Irwandi, Pardi , Raden, Rante, Rina, Tria, dan Siti yang tak henti-henti nya mensupport dan menyemangati penulis hingga detik ini dan selalu menemani disaat suka maupun duka*

*Temen-Teman Satu Almamaterku Terkhusus Sahabat-Sahabatku Angkatan 2021  
Kotler Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara Tanjung Selor*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan ini dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Kaltara. Penulis skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kelising Kecamatan Sekatak”.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, keluarga, dosen dan teman-teman yang ikhlas memberikan bantuan secara moril maupun materil. Dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.TP., M.M selaku Rektor Universitas Kaltara.
2. Ibu Dewi Qomariah Imelda, M.M.Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara.
3. Bapak Dedik Wiryawan, ST,M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang berguna kepada penulis guna menyempurnakan skripsi selaku Ketua Jurusan Manajemen.
4. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara yang telah memberikan bantuan fasilitas selama penulis mengikuti pendidikan.

5. Seluruh responden yang telah membantu mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.
6. Kerabat, saudara tercinta yang selalu ada untuk menghibur dan selalu siap membantu apapun yang dibutuhkan penulis. Serta keluarga besar penulis yang banyak memberikan bantuan secara moril maupun materil.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah banyak memotivasi dan membantu selama ini. Atas segala bantuan, motivasi, bimbingan, dan juga pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna bagi penulis maupun bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan bagi kita semua..

## **ABSTRAK**

Marten, Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara, 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kelising (2) faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Kelising. Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah Field research dengan pendekatan Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Aparat Desa, Tim Pengelola (TPK), dan Kepala Dusun. Objek penelitian ini adalah pengelolaan dana desa. Adapun teknik pengumpulan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kinerja pegawai kantor Desa Kelising sebagai pelayang masyarakat menghasilkan kualitas layanan yang cukup baik. Untuk itu perlu peningkatan yang lebih baik dalam pemberian layanan yang dilakukan oleh pegawai kantor desa demi menciptakan kualitas layanan yang lebih baik, efektif, dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, pengelolaan dana desa di Desa Kelising terbilang cukup baik dimana dalam proses pengelolaannya telah menjalankan prinsip transparansi agar masyarakat mengetahui penyaluran dana maupun penggunaan dana desa yang dilakukan.

Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Pengelolaan Dana

## **ABSTRACT**

*Marten, Analysis of Village Government Performance in Village Fund Management in Kelising Village, Sekatak District. Management Study Program, Faculty of Economics, University of North Kalimantan, 2025. This study aims to determine: (1) the performance of the village government in managing Village Funds in Kelising Village, and (2) the supporting and inhibiting factors in Village Fund management in Kelising Village. This research is a phenomenological study using a qualitative approach. The subjects of this study were Village Officials and Community Leaders. This type of research is field research with a qualitative approach. The subjects of this study were the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Village Officials, Management Team (TPK), and Hamlet Head. The object of this study was village fund management. The data collection techniques were interviews and documentation. The data analysis techniques used were Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing. The results of the study indicate, first, that the performance of Kelising Village office employees as public servants produces fairly good service quality. Therefore, improvements are needed in the service delivery provided by village office employees to create better service quality, effectiveness, and efficiency in carrying out their duties. Second, village fund management in Kelising Village is considered quite good, with the management process adhering to the principle of transparency so that the public is aware of the distribution and use of village funds.*

*Keywords: Employee Performance, Fund Management*

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....              | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....         | ii   |
| BERITA ACARA.....                | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv   |
| RIWAYAT HIDUP .....              | v    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....        | vi   |
| KATA PENGANTAR.....              | viii |
| ABSTRAK .....                    | ix   |
| <i>ABSTRACT</i> .....            | x    |
| DAFTAR ISI .....                 | xi   |
| DAFTAR TABEL .....               | xxv  |
| DAFTAR GAMBAR .....              | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....           | 1    |
| 1.1 Rumusan Masalah .....        | 1    |
| 1.2 Batasan Masalah.....         | 4    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....       | 4    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....      | 4    |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>                  | <b>6</b>  |
| 2.1. MSDM.....                                     | 6         |
| 2.1.1. Pengertian MSDM.....                        | 6         |
| 2.1.2. Fungsi MSDM .....                           | 6         |
| 2.2. Kinerja Pemerintah Desa .....                 | 8         |
| 2.2.1. Pengertian Kinerja Pemerintah Desa.....     | 8         |
| 2.2.2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa .....    | 9         |
| 2.2.3. Indikator Kinerja Pemerintah Desa .....     | 9         |
| 2.3. Pengelolaan Dana Desa .....                   | 10        |
| 2.3.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa .....      | 10        |
| 2.3.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa ..... | 11        |
| 2.3.3. Indikator Pengelolaan Dana Desa .....       | 12        |
| 2.4. Penelitian Terdahulu .....                    | 15        |
| 2.5. Kerangka Pemikiran .....                      | 21        |
| <b>BAB III Metode Penelitian.....</b>              | <b>22</b> |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                        | 22        |
| 3.2. Defenisi Operasional .....                    | 22        |
| 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....             | 23        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 3.3.1. Tempat Penelitian .....             | 23        |
| 3.3.2. Waktu Penelitian .....              | 23        |
| 3.4 Subjek dan Objek Penelitian.....       | 23        |
| 3.4.1. Subjek Penelitian .....             | 23        |
| 3.4.2. Objek Penelitian .....              | 24        |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data.....          | 24        |
| 3.6. Instrumen Penelitian .....            | 26        |
| 3.7. Keabsahan data .....                  | 26        |
| 3.8. Teknik Analisis Data.....             | 27        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>       | <b>30</b> |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 30        |
| 4.1.2. Sejarah Desa Kelising.....          | 30        |
| 4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian ..... | 35        |
| 4.2.1 Hasil Penelitian .....               | 36        |
| 4.2.2. Pembahasan .....                    | 38        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>    | <b>39</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....                       | 39        |
| 5.2. Saran .....                           | 40        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>42</b> |
|----------------------------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN.....</b> | <b>45</b> |
|----------------------|-----------|

## DAFTAR TABEL

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Hasil Penelitian Mubarak & Annisak.....               | 15 |
| Tabel 2.2. Hasil Penelitian Pratiwi & Ulfah.....                 | 16 |
| Tabel 2.3. Hasil Penelitian Nur Sri Devyana .....                | 17 |
| Tabel 2.4. Faktor Pendukung dan Penghambat.....                  | 36 |
| Tabel 4.1 Data Informan .....                                    | 35 |
| Tabel 4.2 Data Reduksi Informan 1 .....                          | 39 |
| Tabel 4.3 Data Reduksi Informan 2 .....                          | 40 |
| Tabel 4.4 Data Reduksi Informan 3 .....                          | 41 |
| Tabel 4.5 Data Reduksi Informan 4 .....                          | 42 |
| Tabel 4.6 Data Reduksi Informan 5 .....                          | 43 |
| Tabel 4.7 Data Reduksi Informan 6 .....                          | 44 |
| Tabel 4.8 Data Reduksi Informan 7&8 .....                        | 45 |
| Tabel 4.9 Kinerja Pemerintah dalam dana Desa .....               | 46 |
| Tabel 4.10 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa ..... | 49 |
| Tabel 4.11 Faktor Pendukung dan Penghambat .....                 | 51 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Alur Berpikir.....      | 20 |
| Gambar 2.2 Kerangka Berpikir ..... | 21 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terus berkembang, desa telah menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan lebih besar kepada desa untuk mengelola anggaran dan sumber daya sendiri melalui kebijakan Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian desa dalam merancang dan melaksanakan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Dana Desa yang setiap tahun dialokasikan kepada ribuan desa di seluruh Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan sosial, serta mengatasi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota.

Namun, besarnya dana yang dikucurkan tidak serta-merta menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan di tingkat desa. Tantangan utama justru muncul dalam praktik pelaksanaan di lapangan, di mana banyak pemerintah desa dihadapkan pada persoalan rendahnya kapasitas aparatur, lemahnya sistem akuntabilitas, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia di sektor publik, kinerja aparatur desa menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana pembangunan yang berbasis anggaran negara dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Fenomena ini juga tercermin secara nyata di Desa Kelising, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis, Desa Kelising berada di wilayah yang strategis dan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Kecamatan Sekatak sendiri dikenal sebagai kawasan dengan perputaran uang dan aktivitas ekonomi tinggi akibat kehadiran sektor pertambangan dan perkebunan. Dana Desa yang dikucurkan ke Desa Kelising tergolong signifikan, dan secara administratif, laporan realisasi anggaran menunjukkan pencapaian 100 persen. Namun demikian, keberhasilan administratif ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Di lapangan, masih banyak keluhan warga terkait infrastruktur dasar yang belum memadai, seperti jalan desa yang rusak dan jembatan penghubung yang kurang layak. Beberapa kepala desa di Kecamatan Sekatak, termasuk Desa Kelising, bahkan mengadukan kondisi ini kepada DPRD dalam forum Rapat Dengar Pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana telah terserap, pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Kesenjangan antara data pelaporan dan kondisi riil di lapangan menjadi sorotan penting dalam menilai kinerja pemerintah desa.

Selain itu, muncul kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan Dana Desa, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Bupati Bulungan yang menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas dalam pengelolaan anggaran. Dalam beberapa kasus di desa lain, penyimpangan seperti mark-up anggaran, pengurangan volume fisik pekerjaan, hingga laporan fiktif menjadi ancaman

nyata. Hal ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah Desa Kelising untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sayangnya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan masih tergolong rendah. Musyawarah desa sering kali hanya dihadiri oleh segelintir orang dan belum mencerminkan aspirasi kolektif warga desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa secara nominal telah tersedia dan disalurkan, namun belum tentu memberikan dampak optimal jika tidak didukung oleh kinerja pemerintah desa yang kuat, profesional, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yang komprehensif terhadap kinerja pemerintah Desa Kelising dalam mengelola Dana Desa, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan sistem pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelising, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.”

## **1.2. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini adalah untuk menghindari uraian yang tidak berkaitan dengan topik yang dibahas, masalah penelitian ini hanya terfokus pada hasil kerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kaloling

## **1.3. Rumusan Masalah**

Dalam rumusan masalah ini bertujuan untuk merumuskan masalah agar penelitian penelitian ini lebih terarah dalam batasan yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa Kelising Kecamatan Sekatak?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk Mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis (Ilmiah) Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah wawasan terkait

Kinerja Pegawai Kantor Desa dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak.

2. Manfaat Praktis Adapun manfaat tersusunnya skripsi ini antara lain:
  1. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada program studi Manajemen dan memperoleh gelar
  2. Diharapkan hasil ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya
  3. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi informasi penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. MSDM**

##### **2.1.1 Pengertian MSDM**

Menurut Bintoro dan Daryanto (2017 : 15) menyatakan bahwa “Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal”.

##### **2.1.2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut Edwin B. filippo dan Malayu S.P Hasibuan (2016:21) fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

###### **1. Fungsi manajerial**

###### **a. Perencanaan (planning)**

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perencanaan dalam proses perekrutan karyawan sangat penting untuk menganalisis jabatan yang perlu diisi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan.

###### **b. Pengorganisasian (organizing)**

Pengorganisasian diartikan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian dan menyediakan alat-alat yang diperlukan oleh karyawan dalam menunjang pekerjaan.

c. Pengawasan (controlling)

Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses monitoring kegiatan-kegiatan, tujuannya untuk menentukan harapan-harapan yang akan dicapai dan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Harapan - harapan yang dimaksud adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dan program-program yang telah direncanakan untuk dilakukan dalam periode tertentu. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Dengan dilakukannya pengawasan secara menyeluruh akan mempermudah bagi suatu instansi dalam menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam manajemen. Sehingga, solusi dari permasalahan yang muncul akan bisa diambil secara bijak.

d. Motivasi (Motivating) Motivasi adalah karakteristik psikologi manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Motivasi termasuk faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu. Motivasi juga dapat diartikan pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya

upaya untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai kinerja yang tinggi.

e. Evaluasi (evaluating)

Evaluasi atau disebut juga pengendalian merupakan kegiatan system pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan dalam kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi, dan memberikan ganjaran. Dengan evaluasi yang dilakukan perusahaan dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi.

## **2.2. Kinerja Pemerintah Desa**

### **2.2.1. Pengertian Kinerja Pemerintah Desa**

Menurut Jesica Tunta. (2024), kinerja pemerintah desa adalah hasil upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang diukur melalui indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Kinerja yang baik tercermin dari pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang sesuai kebutuhan masyarakat desa.

### **2.2.2. Pengukuran kinerja pemerintah desa**

Dwiyanto (2021) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi, yaitu:

- a. Produktivitas: mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- b. Kualitas layanan: mengukur kepuasan masyarakat atas layanan dari sebuah organisasi publik.
- c. Responsivitas: kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Reponsibilitas: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan organisasi.
- e. Akuntabilitas: seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

### **2.2.3. Indikator Kinerja Pemerintah Desa**

Menurut Agus Dwiyanto (2017) Menyatakan bahwa kinerja perangkat desa dapat diukur dari indikator

#### **1. Produktivitas**

Mengukur seberapa efektif dan efisien perangkat desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan.

#### **2. kualitas layanan**

Menilai mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk kecepatan, ketepatan, dan keramahan dalam melayani kebutuhan warga.

### 3. Responsivitas

Kemampuan perangkat desa untuk merespon dengan cepat dan tepat kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa.

### 4. tanggungjawab (tanggung jawab)

Tingkat kepatuhan dan kesungguhan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan kewajibannya.

### 5. Akuntabilitas

Kemampuan perangkat desa dalam memberikan transparansi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat dan pihak terkait.

## **2.3. Pengelolaan Dana Desa**

### **2.3.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Suparmoko (2016), pengelolaan dana desa adalah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan, Menurut Sutiyo & Maharani (2019) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa adalah suatu sistem kebijakan fiskal desa yang mengatur proses mulai dari perencanaan berbasis musyawarah desa, pelaksanaan program, pengawasan, hingga evaluasi agar pembangunan desa dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

### **2.3.2. Prinsip – Prinsip Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Dwiyanto (2018) dalam bukunya "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance) agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain:

#### **1. Transparansi**

Pengelolaan dana desa wajib dilakukan secara terbuka, artinya semua proses dan informasi terkait penggunaan dana desa harus dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi menciptakan kepercayaan publik dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Contohnya, informasi anggaran desa harus dipublikasikan melalui baliho atau papan informasi di kantor desa.

#### **2. Akuntabilitas**

Setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara hukum. Pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **3. Partisipatif**

Perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini dilakukan melalui musyawarah desa, yang menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat secara demokratis.

#### **4. Efektivitas dan Efisiensi**

Dana desa harus digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran agar hasil yang dicapai sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan, sedangkan efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.

#### 5. Keadilan dan Kebutuhan Lokal

Penggunaan dana desa harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, yaitu mendahulukan kepentingan masyarakat miskin, marginal, dan wilayah yang tertinggal. Dana desa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata dan prioritas lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing desa.

#### 6. Swasembada dan Kemandirian Desa

Pengelolaan dana desa harus diarahkan untuk mendorong kemandirian desa, yaitu dengan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, lembaga desa, serta mendorong inisiatif lokal dalam pembangunan. Dana desa tidak boleh menciptakan ketergantungan jangka panjang.

### **2.3.3. Indikator Pengelolaan Dana Desa**

Indikator-indikator pengelolaan Dana Desa secara umum merujuk pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dijelaskan oleh Agus Dwiyanto (2018). Adapun Indikator Pengelolaan Dana Desa antara lain ;

#### 1. Perencanaan Dana Desa

Indikator ini menilai sejauh mana pemerintah desa mampu menyusun perencanaan secara partisipatif, transparan, dan tepat waktu. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh

elemen masyarakat desa, seperti tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan lembaga desa lainnya. Dalam tahap ini, hasil musyawarah harus dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang kemudian dijadikan dasar penyusunan APBDDes. Kualitas perencanaan diukur dari seberapa sesuai program-program yang dirancang dengan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi desa.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan, indikator ini melihat kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dan pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan yang baik ditandai dengan realisasi kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran, serta melibatkan peran aktif masyarakat, terutama dalam kegiatan padat karya. Selain itu, pelaksanaan juga dilihat dari mutu hasil kegiatan, baik yang bersifat fisik seperti pembangunan infrastruktur, maupun non-fisik seperti pelatihan pemberdayaan. Capaian pelaksanaan yang baik menunjukkan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

## 3. Penatausahaan dan Administrasi Keuangan

Indikator ini mengukur sejauh mana desa menjalankan pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan secara tertib dan akuntabel. Penatausahaan yang baik ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi keuangan yang lengkap dan sah, penggunaan sistem aplikasi keuangan desa (seperti Siskeudes), serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Setiap pengeluaran dana harus dapat dilacak dan

dibuktikan secara administratif, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan dana yang diterima. Indikator ini dinilai dari ketepatan waktu dan kelengkapan dalam menyusun laporan realisasi kegiatan dan anggaran, baik laporan semesteran maupun tahunan. Laporan ini wajib disampaikan kepada BPD, pemerintah kecamatan, serta dibuka kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan. Laporan yang disusun dengan baik mencerminkan keseriusan desa dalam mempertanggungjawabkan setiap dana yang digunakan.

#### 5. Transparansi Informasi Publik

Transparansi menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah desa membuka akses informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Transparansi ditunjukkan melalui penyampaian informasi publik secara terbuka, seperti pemasangan baliho atau papan informasi tentang APBDes, kegiatan, dan hasil realisasi anggaran. Transparansi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga mendorong kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa.

#### 6. Pengawasan dan Evaluasi

Indikator ini mengukur adanya mekanisme pengawasan baik dari internal desa seperti BPD, maupun dari eksternal seperti masyarakat,

inspektorat, atau auditor independen. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah program yang dibiayai oleh dana desa berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, indikator ini juga mencakup tindak lanjut terhadap hasil pengawasan atau audit, sebagai bentuk komitmen desa dalam memperbaiki sistem dan mencegah terjadinya penyimpangan.

#### **2.4. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian terdahulu telah diuraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang didapat oleh penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 2.1****Hasil Penelitian Mubarak & Annisak, 2021**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | Mubarak & Annisak, 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Judul Penelitian                   | Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubung Kabupaten Grobongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metode analisis                    | Kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hasil Penelitian                   | <p>hasil penelitiannya beliau berkesimpulan bahwa pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa diawali dengan proses perencanaan dalam APBD melalui MUSRENBANGDES, pengorganisasian dilakukan dengan menunjuk tim pengelola dana desa, pelaksanaannya . ditangani oleh tim pengembangan, ikhtisar dimulai. pada tahun 1999-1999. dari perencanaan hingga pelaporan dan pelaporan pertanggungjawaban dalam APBD. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaan terletak pada tujuan pencapaian dimana pada penelitian terdahulu hanya meneliti tentang analisis pengelolaan dana desa sedangkan penuls menelti tentang kinerja pegawai kantor desa dalam mengelola dana desa dengan menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi.</p> |

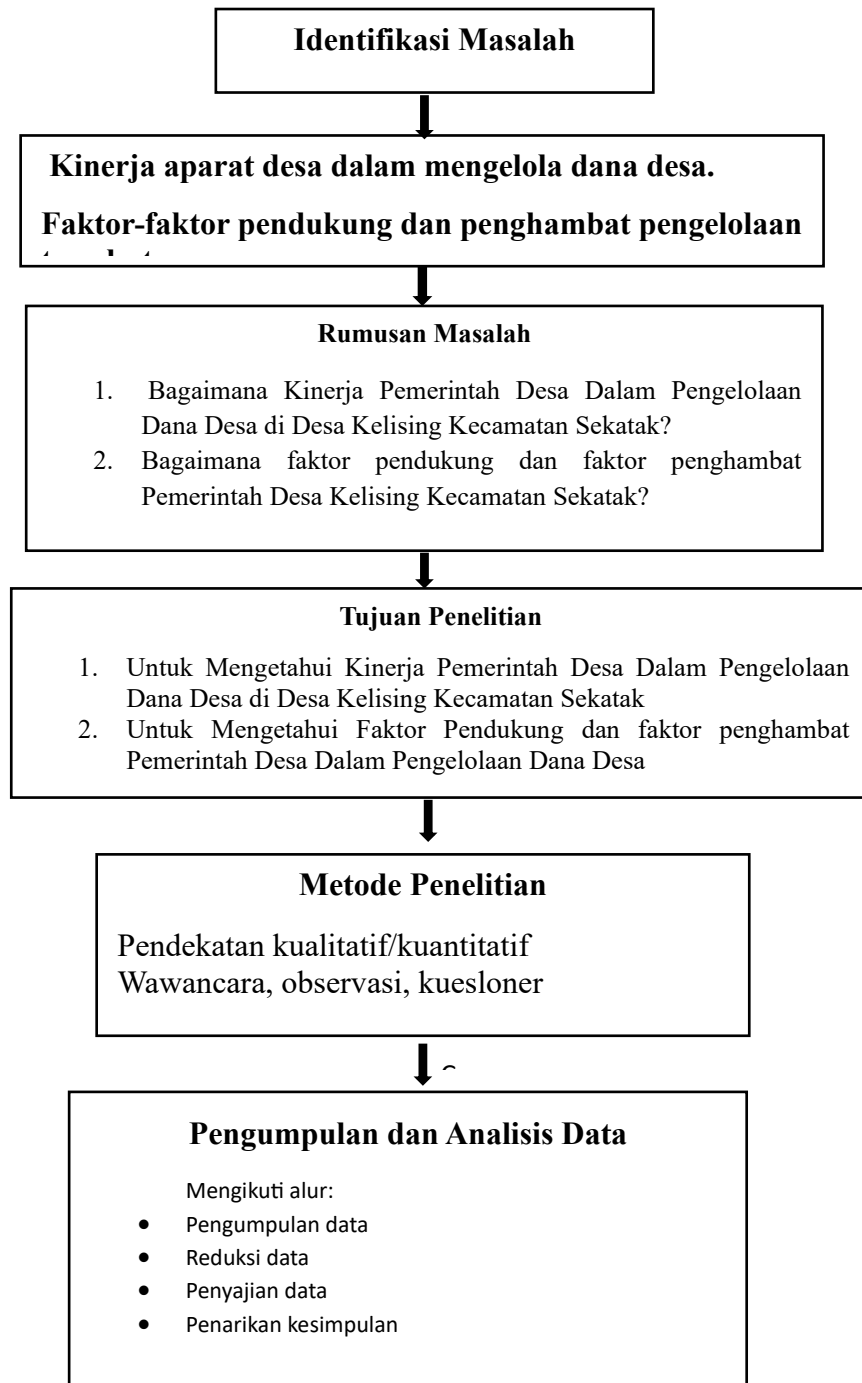
**Tabel 2.2****Hasil Penelitian Pratiwi & Ulfah, 2018**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | Pratiwi & Ulfah, 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Judul Penelitian                   | Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Metode analisis                    | Kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hasil Penelitian                   | <p>Penelitiannya menyimpulkan bahwa persepsi peraturan pemerintah tentang akuntabilitas dana desa dalam penyelenggaraan perangkat pemerintahan desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. peralatan Pemerintah kabupaten harus selalu mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang tanggung jawab kas desa untuk meningkatkan pemahaman mereka. Hal ini meningkatkan kinerja perangkat desa. Karena desa merupakan peluang kecil untuk memperbaiki keadaan negara. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada kinerja aparatur atau pegawai dalam pengelolaan dana desa. Perbedaannya terletak pada tujuan kinerja, dimana pada penelitian sebelumnya ingin mengetahui pemahaman diam-diam peraturan pengelolaan dana desa, implementasi tata kelola yang baik dan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja perangkat kepala desa dalam dana desa. Akuntabilitas sebagai penulis mengkaji kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p> |

**Tabel 2.3****Hasil Penelitian Nur Sri Devyana 2020**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | Nur Sri Devyana 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Judul Penelitian                   | Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Metode analisis                    | Kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hasil Penelitian                   | meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa ngroto kecamatan pujon kabupaten malang dapat disimpulkan bahwa : 1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Desa Ngroto sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang pengelolaan Dana Desa, serta dapat meningkatkan pembangunan fisik dan juga pemberdayaan masyarakat desa tersebut. 2. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Ngroto sudah dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian desa, pembangunan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat terutama dalam membangun jiwa partisipasi untuk masyarakat menjadi lebih besar agar kepedulian masyarakat desa ngroto juga menjadi lebih meningkat. 3. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Desa Ngroto menerapkan asas dan nilai di dalam keuangan desa yaitu asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Adapun nilai yang diterapkan seperti nilai-nilai berpihak terhadap |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>kelompok rumah tangga miskin, berpihak terhadap keadilan gender, dan berpihak terhadap kelompok terseksi lainnya. 4. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Ngroto secara normative sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan juga PP nomor 22 Tahun 2015 serta prinsip prinsip yang ada dalam Good Village Governance. 5. Dana Desa memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di desa ngroto. desa ngroto mampu melaksanakan pembangunan desa yang optimal sehingga mencapai idm tertinggi nasional. 6. Pemerintah desa ngroto sangat memperhatikan aspirasi dan partisipasi warga. kebutuhan warga akan kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman sangat diperhatikan oleh pemerintah desa. layanan terhadap kebutuhan tersebut merupakan kumpulan dari 38 indikator indeks ketahanan sosial. sedangkan layanan kebutuhan ekonomi masyarakat desa, pemerintah desa melakukan penyediaan fasilitas publik yang sangat mendukung kegiatan perekonomian warga sehingga memperkuat indeks ketahanan ekonomi. sementara itu untuk indeks ketahanan ekologi (lingkungan) didukung oleh kesadaran warga desa ngroto dalam memelihara kelestarian alam dan lingkunganpenerapan transparansi dan akuntabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

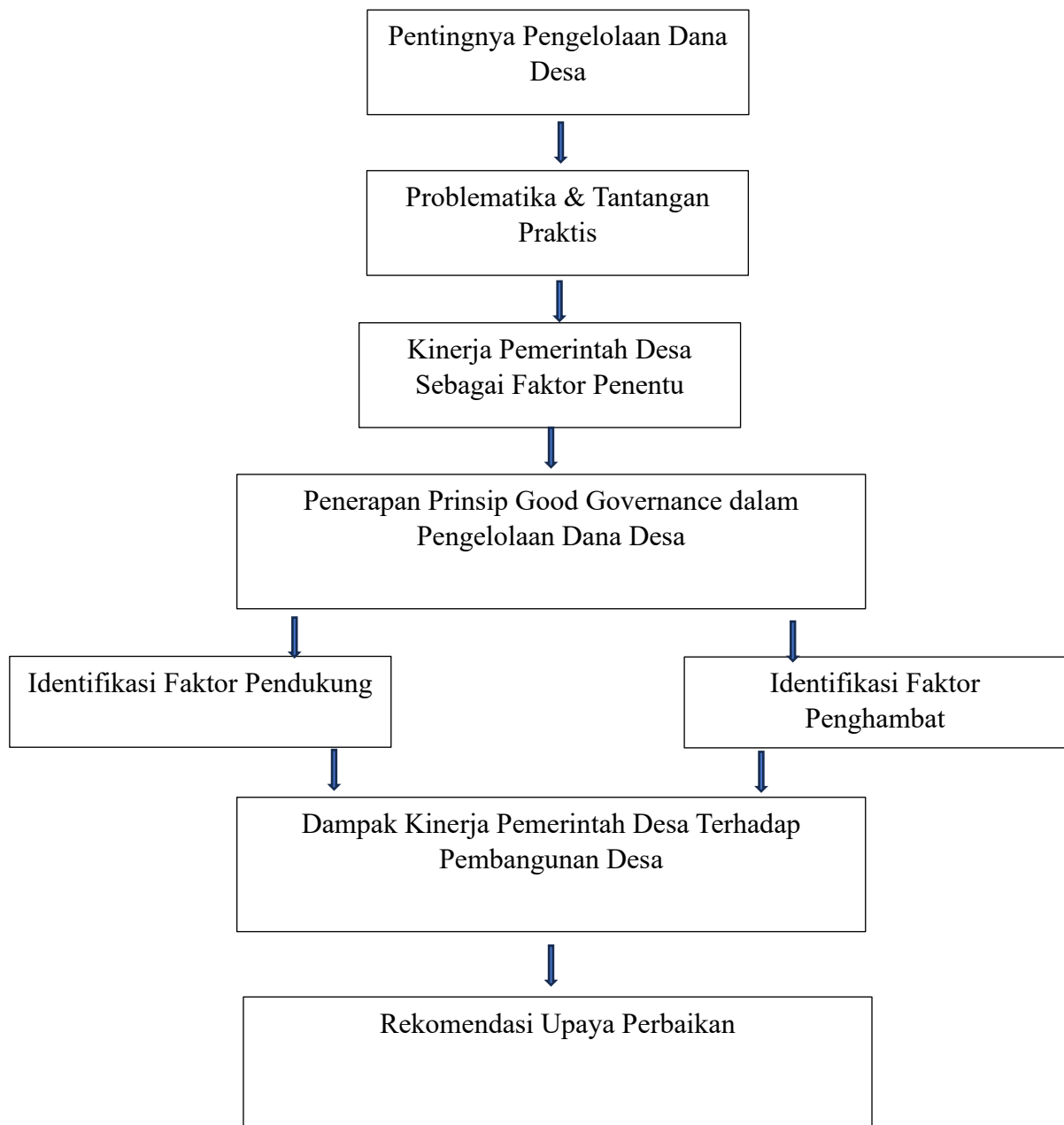


**Gambar 2.1**  
**Alur Berpikir Penelitian**

## 2.5. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang Bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Istilah pendekatan menurut Sugiyono (Prasanti, 2018) adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari tempat-tempat yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. sebagai generalisasi. Pendekatan ini umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan manusia, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, fungsi sosial dan banyak lagi. Salah satu alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dalam menemukan metode dan memahami apa yang melatarbelakangi fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk melestarikan bentuk dan isi perilaku manusia serta menganalisis ciri-cirinya, bukan mengubahnya menjadi unit-unit kuantitatif.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Kelising Kecamatan Sekatak, yang beralamat di Desa Kelising Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

### 3.3.1 Waktu Penelitian

**Tabel 3.2**  
**Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian**

| Kegiatan           | Tahun 2025 |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
|--------------------|------------|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|--|--|
|                    | Jan        |   |   |   | Feb |   |   | Mar |   |   |   | Apr |   |   |   | Mei |   |   | Jun |   |   |   | Jul |   |   |   |  |  |
|                    | 1          | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Observasi          |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Awal               |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Pengajuan          |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Judul              |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Penyusunan Skripsi |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Proposal           |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Seminar            |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Proposal           |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Pengumpulan Data   |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Penyusunan         |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Skripsi            |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |
| Sidang Skripsi     |            |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |

*Sumber Dirancang Untuk Penelitian 2025*

### 3.3 Subjek dan Objek Penelitian

#### 3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah 31 penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Aparat Desa, Tim Pengelola (TPK), dan Tokoh Masyarakat.

#### 3.3.2 Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi dan menjadi objek penelitian untuk memperoleh informasi secara lebih tepat sasaran. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini adalah Studi Lapangan. Penelitian lapangan adalah pengumpulan informasi tentang lokasi penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi lisan langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka dan transparan agar peneliti dapat memahami aktivitas aparatur kantor desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak dalam mengelola dana desa. Wawancara dilakukan sedemikian rupa sehingga responden diberikan pertanyaan yang diajukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang benar. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan Dana Desa dari berbagai sumber.

#### 2. Dokumentasi

Metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan informasi berupa dokumen dan foto terkait pengelolaan sumberdaya desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah kualitas instrumen penelitian. Instrument utama dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, namun begitu penelitiannya menjadi jelas, instrumen penelitian sederhana cenderung mengarah pada kesuksesan dan, memang seharusnya melengkapi materi dan bandingkan dengan materi yang terima selama melakukan penelitian.

#### a. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini instrumen sentral dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, sehingga angket yang digunakan penulis adalah seperangkat pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti, yang tujuannya agar peneliti memilih informasi yang berkaitan dengan judul yaitu aktivitas desa. di kantor. Dana desa dikelola oleh pegawai.

#### b. Alat-alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah foto, buku catatan dan manual yang ada di lokasi penelitian.

### 3.6 Keabsahan Data

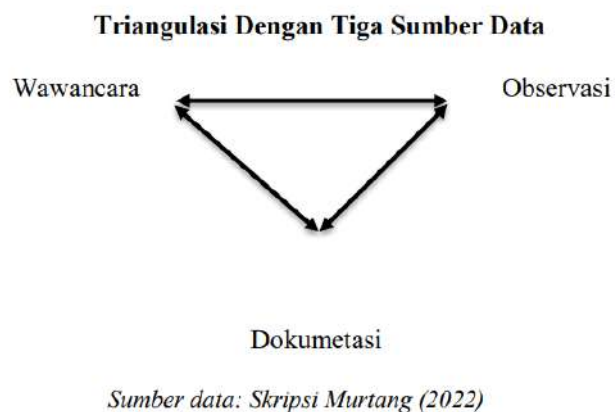
Menurut Sugiyono (2019:363), Keabsahan data adalah yang dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data yang telah diteliti maka dapat dilakukan melalui triangulasi data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

#### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber serta membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi.

#### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dengan prosedur ini, penelitian memastikan bahwa data yang dihasilkan valid dan kredibel, serta memberikan gambaran yang akurat mengenai pemerintah Desa.



### 3.7 Teknik Analisa Data

Noeng Muhadjir memperkenalkan konsep analisis data sebagai upaya pencarian dan pengorganisasian observasi, wawancara, dan lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

menyajikannya sebagai hasil kepada orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis harus dilanjutkan, berusaha mencari makna (Rijali, 2018).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata-kata bukan kumpulan angka dan tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, ringkasan dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (merekam, menulis, mengedit atau menyalin). Namun, analisis kualitatif masih menggunakan kata-kata yang sering diproduksi dalam bentuk yang diperluas. Teks dan bukan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat analisis.

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan pencatatan, setelah itu data dianalisis dengan tahapan yang berbeda seperti teknik pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang didapatkan dalam penelitian yang nantinya akan memperkuat data yang digunakan sebagai bahan penelitian. Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

### 2. Reduksi Data

Setelah penelitian mendapatkan semua informasi dari berbagai sumber, yaitu. Dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan, peneliti melakukan analisis

data tahap awal yaitu. reduksi data. Data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengumpulan data bagi peneliti.

### 3. Penyajian Data

Pada saat penyampaian materi disajikan secara teratur, menunjukkan hubungan jalan, hubungan informasi dan menggambarkan kondisi yang ada, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat. Penyajian materi penelitian biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif dengan deskripsi.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Peneliti menarik kesimpulan dengan cara menyederhanakan dan menyajikan data kemudian meninjau kembali secara berulang-ulang hingga sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Kelising**

Desa Kelising merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Terletak di kawasan pedalaman yang masih didominasi oleh hutan tropis dan aliran sungai, Desa Kelising dikenal sebagai desa yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya lokal yang masih terjaga.

Awal mula terbentuknya Desa Kelising tidak terlepas dari sejarah migrasi masyarakat suku Dayak dan Tidung yang merupakan penduduk asli wilayah pedalaman Kalimantan. Menurut penuturan para tokoh adat dan sesepuh desa, masyarakat pertama kali menetap di wilayah ini pada sekitar awal tahun 1960-an. Pemukiman awal terbentuk dari kelompok-kelompok kecil keluarga yang hidup secara subsisten dengan mengandalkan hasil hutan, berburu, dan pertanian ladang berpindah.

Nama "Kelising" sendiri konon berasal dari kata dalam bahasa lokal yang merujuk pada sebuah pohon besar yang dahulu menjadi penanda arah dan tempat berkumpulnya masyarakat. Pohon tersebut tumbuh di tengah kampung dan menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat, baik secara sosial maupun spiritual.

Seiring waktu, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah mulai mendorong program pemukiman kembali (transmigrasi lokal) dan pembangunan infrastruktur dasar. Hal ini menjadikan Desa Kelising mulai berkembang, baik dari segi jumlah penduduk, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan. Pada tahun 1980-an, Desa Kelising secara resmi ditetapkan sebagai desa definitif oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Dalam perkembangannya, masyarakat Desa Kelising mulai mengenal dan mengembangkan pertanian tetap, peternakan, dan usaha-usaha mikro lainnya. Meski demikian, sebagian besar masyarakat masih mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan alam dan adat istiadat.

Saat ini, Desa Kelising terus berbenah mengikuti arus pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan statusnya sebagai desa yang berada di wilayah strategis Kalimantan Utara, Desa Kelising memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan, kehutanan, serta ekowisata, jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

#### A. Wilayah Administratif

Desa Kelising merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Secara administratif, Desa Kelising berada dalam lingkup pemerintahan Kecamatan Sekatak yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bulungan. Letaknya berada di daerah pedalaman yang masih didominasi oleh kawasan hutan tropis

dan lahan berbukit. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Sekatak Bengara di sebelah utara, kawasan hutan produksi dan desa-desa lain di Kecamatan Sekatak di sebelah selatan, Desa Terindak dan beberapa wilayah konsesi perusahaan perkebunan di sebelah timur, serta kawasan hutan lindung di sebelah barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan, luas wilayah Desa Kelising tercatat sebesar 62,82 kilometer persegi. Wilayah ini mencakup kawasan pemukiman, lahan pertanian, hutan desa, dan area potensial untuk pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam. Secara internal, Desa Kelising terdiri atas beberapa wilayah pemukiman yang tersebar dan dibagi dalam satuan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Beberapa dusun yang dikenal di dalam wilayah desa ini antara lain Dusun Kelising Hulu, Dusun Kelising Hilir, dan Kampung Baru. Akses menuju Desa Kelising masih cukup terbatas, terutama pada musim hujan, dengan moda transportasi utama berupa kendaraan roda dua dan empat melalui jalan tanah, serta jalur sungai di beberapa bagian wilayah. Di dalam desa telah tersedia fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah dasar, balai pertemuan, tempat ibadah, serta lahan pertanian dan kebun masyarakat. Meskipun letaknya terpencil, Desa Kelising memiliki potensi besar untuk berkembang jika ditunjang oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

#### B. Komoditas

Desa Kelising memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan beragam, baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga hasil hutan

bukan kayu. Masyarakat desa sebagian besar menggantungkan hidup dari kegiatan-kegiatan sektor primer. Adapun komoditas utama yang menjadi andalan masyarakat Desa Kelising meliputi:

#### 1. Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan utama yang dikembangkan baik oleh perusahaan swasta maupun oleh masyarakat secara mandiri. Sejak awal tahun 2010-an, sebagian lahan masyarakat telah ditanami kelapa sawit sebagai alternatif sumber pendapatan jangka panjang.

#### 2. Karet (Lateks)

Tanaman karet merupakan salah satu komoditas tradisional yang telah lama dikembangkan di wilayah Desa Kelising. Banyak petani menggantungkan hidupnya dari hasil penyadapan karet yang kemudian dijual ke pengepul lokal.

#### 3. Padi Ladang (Padi Gunung)

Meskipun belum secara intensif menggunakan teknologi pertanian modern, masyarakat masih mempertahankan sistem pertanian tradisional dengan menanam padi ladang (padi gunung), yang menjadi sumber pangan utama

#### 4. Lada (Merica)

Sebagian warga juga menanam lada dalam skala kecil hingga menengah. Komoditas ini mulai diminati karena memiliki nilai jual tinggi dan cocok ditanam di dataran tinggi dan tanah berbukit seperti di Kelising.

#### 5. Peternakan Rakyat

Masyarakat Desa Kelising memelihara hewan ternak seperti ayam kampung, babi, kambing, dan sapi dalam skala rumah tangga. Hasil ternak digunakan untuk kebutuhan konsumsi lokal, upacara adat, dan dijual saat diperlukan.

#### 6. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Hutan di sekitar Desa Kelising menghasilkan berbagai HHBK seperti rotan, damar, madu hutan, dan buah-buahan hutan yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat secara tradisional.

#### 7. Ikan Air Tawar

Beberapa sungai dan anak sungai yang melintasi desa menjadi sumber ikan air tawar seperti ikan haruan (gabus), baung, dan toman. Selain ditangkap secara tradisional, beberapa warga mulai membudidayakan ikan dalam kolam kecil.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Kelising



#### 4.1.3 Data Collection (Pengumpulan Data)

Berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, teori-teori yang mendukung penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian. Penelitian akan dipaparkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada bulan Maret 2025 hingga bulan Juni 2025 yang dilakukan pada Kantor Desa Kelising dan informan lain yang terkait dengan pemerintah desa. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai berasal dari beberapa pihak yang

berkaitan dengan Pemerintah Kantor Desa Kelising. Informan yang berhasil diwawancarai yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Informan**

| <b>Nama</b>    | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jabatan</b>    | <b>Keterangan</b> |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Armansyah      | Laki-laki            | Kepala Desa       | Informan 1        |
| Yalik          | Laki-laki            | Sekretaris Desa   | Informan 2        |
| Alung          | Laki-laki            | Bendahara Desa    | Informan 3        |
| Rensi Alfonita | Perempuan            | Kaur Perencanaan  | Informan 4        |
| Recky Setiawan | Laki-laki            | Kasi Pemerintahan | Informan 5        |
| Syakir         | Laki-laki            | Kepala Dusun      | Informan 6        |
| Andi Saputra   | Laki-laki            | Warga Desa        | Informan 7        |
| Maria Lestari  | Perempuan            | Warga Desa        | Informan 8        |

*Sumber: data diolah penulis*

#### **4.1.3.1 Deskripsi Identitas Informan**

Berikut adalah identitas informan, yang mana informan disini dibedakan menjadi dua bagian yaitu informan kunci, informan kunci adalah orang-orang yang dipilih menjadi narasumber atas pertimbangan mereka yang terlibat sepenuhnya dalam aktivitas Pemerintah Desa. informan pendukung, sedangkan informan pendukung adalah orang-orang yang dipilih menjadi narasumber atas pertimbangan bahwa orang-orang ini yang terdampak secara langsung akan keberadaan Pemerintah Desa. serta orang yang mempunyai kapasitas dalam menilai perkembangan Pemerintah Desa itu sendiri.

## **A. Informan Kunci**

Informan kunci disini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung, atau orang-orang yang bertugas untuk menggerakkan fungsi Pemerintah Desa:

### **a. Informan 1**

Nama : Armansyah  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Kepala Desa  
 Tanggal Wawancara : 26 Juni 2025  
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Kelising

### **b. Informan 2**

Nama : Yalik  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Sekretaris Desa  
 Tanggal Wawancara : 26 Juni 2025  
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Kelising

### **c. Informan 3**

Nama : Alung  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Bendahara/Kaur Keuangan  
 Tanggal Wawancara : 26 Juni 2025  
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Kelising

**d. Informan 4**

Nama : Rensi Alfonita  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : Kaur Perencanaan  
 Tanggal Wawancara : 27 Juni 2025  
 Tempat Wawancara : Desa Kelising

**e. Informan 5**

Nama : Reky Setiawan  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Kasi Pemerintahan  
 Tanggal Wawancara : 27 Juni 2025  
 Tempat Wawancara : Desa Kelising

**B. Informan Pendukung**

Informan pendukung adalah orang-orang atau narasumber yang di pilih dan ditetapkan untuk menguatkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan kunci. Dalam hal ini yaitu Kepala Dusun Kelising:

**a. Informan 6**

Nama : Syakir  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Kepala Dusun  
 Tanggal Wawancara : 27 Juni 2025  
 Tempat Wawancara : Desa Kelising

**b. Informan 7**

Nama : Andi Saputra  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Warga Desa (Petani Karet)  
Tanggal Wawancara : 28 Juni 2025  
Tempat Wawancara : Dusun Kelising Hilir

**c. Informan 8**

Nama : Maria Lestari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Warga Desa (Ibu Rumah Tangga)  
Tanggal Wawancara : 28 Juni 2025  
Tempat Wawancara : Dusun Kelising Hulu

**Tabel 4.2**  
**Reduksi Data dan Triangulasi Sumber Informan 1**

| No | Pertanyaan                                                                                                                                    | Jawaban                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?                    | Peran pemerintah dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana desa dengan melaksanakan musyawarah yang melibatkan masyarakat serta pemasangan transparansi APBDes di beberapa titik di desa Kelising. |
| 2  | Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?                           | Program Musrenbangdes selalu dilaksanakan setiap tahun pada awal-awal bulan. Dalam forum musyawarah tersebut melibatkan Masyarakat juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran.          |
| 3  | Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?                                                                                        | Biasanya pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes dilakukan pada bulan awal tahun berjalan.                                                                                                                              |
| 4  | Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan ADD? | Pemerintah desa menampung segala apresiasi, saran atau usulan dari masyarakat. Usulan tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi panduan dalam penyusunan RKPD, yang menjadi dasar penyusunan APBDes.               |
| 5  | Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan?                                           | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk di desa sebagai pelaksana kegiatan untuk mengelola keuangan menjadi bagian penting dalam pembangunan sarana prasarana desa seperti pembangunan jalan.                   |
| 6  | Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD?                                                                   | Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan dana desa sebagai bentuk penunjang kelancaran melalui usulan-usulan yang disaring .                                                                                          |
| 7  | Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan ADD?                                                                    | Sejauh ini tidak terdapat kendala karena sebelum kegiatan dilaksanakan telah dilakukan musyawarah bersama masyarakat seperti kepala dusun dan tokoh masyarakat.                                                    |
| 8  | Bagaimana tingkat pelaporan dari pemerintah desa terkait kegiatan anggaran desa?                                                              | Laporan keuangan berbentuk dokumen yang terdiri dari penggunaan dana desa, termasuk realisasi pendapatan dan biaya. Dilakukan pada periode tertentu.                                                               |

*Sumber: data diolah penulis (2025)*

**Tabel 4.3**  
**Reduksi Data dan Triangulasi Sumber Informan 2**

| No | Pertanyaan                                                                                                                 | Jawaban                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa? | Pemerintah desa melaksanakan pengumuman atau penyampaian kepada masyarakat baik melalui media online seperti Facebook ataupun pemasangan baliho dan papan transparansi anggaran. |
| 2  | Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?        | Musrenbangdes dilakukan setiap tahun dan merupakan bagian dari SOP perencanaan desa.                                                                                             |
| 3  | Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?                                                                     | Dilaksanakan di awal tahun berjalan, biasanya paling lambat bulan Maret.                                                                                                         |
| 4  | Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta musyawarah?                                 | Pemerintah desa mengakomodir usulan dengan menyusunnya ke dalam RKPDes dan disinkronkan dengan anggaran yang tersedia baik dari ADD, Dana Desa, maupun BHP.                      |
| 5  | Siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan pembangunan di desa?                               | Masyarakat desa, lembaga-lembaga yang ada, serta tim auditor dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).                                                                    |
| 6  | Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD?                                                | Partisipasi masyarakat sangat baik, terbukti dari keikutsertaan dalam Musrenbangdes dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.                                                        |
| 7  | Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan ADD?                                                 | Terkadang ada perubahan peraturan yang tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga dilakukan penyesuaian atau perubahan anggaran.                                                 |

*Sumber: data diolah penulis (2025)*

**Tabel 4.4**  
**Reduksi Data dan Triangulasi Sumber Informan 3**

| No | Pertanyaan                                                                                                                             | Jawaban                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam perencanaan program ADD? | Melalui pemasangan spanduk transparansi di beberapa titik seperti di depan kantor desa dan masjid Dusun Bainang. Transparansi dilakukan agar masyarakat mengetahui penggunaan dana desa dan mencegah kecurangan. |
| 2  | Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?                              | Laporan keuangan dilakukan secara berkala, disusun sesuai prosedur, dan diumumkan kepada masyarakat.                                                                                                             |
| 3  | Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam realisasi ADD?                                                      | Akuntabilitas diterapkan melalui pencatatan yang tertib, penyusunan laporan, dan pelaporan sesuai dengan sistem keuangan desa (Siskeudes).                                                                       |
| 4  | Apakah ada kendala atau kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?                                                       | Tidak ada kendala yang berarti karena sistem dan prosedur sudah dijalankan dengan baik sesuai SOP dan didukung oleh pelatihan sebelumnya.                                                                        |
| 5  | Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktural seperti laporan realisasi dan lainnya?                                   | Ya, pencatatan dilakukan sesuai struktur yang telah ditentukan, seperti laporan realisasi kegiatan, laporan keuangan, dan dokumentasi lainnya.                                                                   |

*Sumber: data diolah penulis (2025)*

**Tabel 4.5**  
**Reduksi Data dan Triangulasi Sumber Informan 4**

| No | Pertanyaan                                                                       | Jawaban                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik dari Dana Desa?                          | Pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan dilakukan berdasarkan usulan prioritas masyarakat. Namun pelaksanaan kadang mengalami hambatan karena cuaca dan akses distribusi material yang sulit. |
| 2  | Bagaimana teknis pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh TPK?                    | Pengawasan dilakukan secara harian dan berkala, mencatat progres pekerjaan, serta memastikan kesesuaian dengan rencana teknis yang telah disepakati dalam musyawarah.                              |
| 3  | Apakah masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik?                  | Ya, masyarakat dilibatkan melalui program padat karya tunai dan sebagai pengawas sosial yang turut memantau pelaksanaan di lapangan.                                                               |
| 4  | Apakah pelaksanaan kegiatan selalu sesuai dengan perencanaan yang telah disusun? | Tidak selalu. Kadang ada perubahan teknis di lapangan karena kondisi geografis atau faktor teknis, tapi selalu dikonsultasikan dengan pemerintah desa dan masyarakat.                              |
| 5  | Bagaimana bentuk koordinasi antara TPK dan perangkat desa lainnya?               | TPK melakukan pelaporan rutin kepada Kepala Desa, Sekretaris, dan BPD. Koordinasi dilakukan melalui rapat mingguan atau saat ditemukan masalah di lapangan.                                        |

*Sumber: data diolah penulis (2025)*

**Tabel 4.6**  
**Reduksi Data dan Triangulasi Sumber Informan 5**

| No | Pertanyaan                                                                             | Jawaban                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa? | Sudah cukup baik, namun masih banyak masyarakat yang belum dilibatkan secara langsung. Beberapa proyek pembangunan fisik juga belum merata ke seluruh wilayah dusun.  |
| 2  | Apakah masyarakat merasa dilibatkan dalam proses musyawarah desa?                      | Tidak semua. Umumnya hanya tokoh masyarakat tertentu dan perangkat desa yang hadir. Masyarakat umum sering kali hanya mendapat informasi setelah kegiatan diputuskan. |
| 3  | Bagaimana akses masyarakat terhadap informasi penggunaan Dana Desa?                    | Masih terbatas. Informasi memang ada di papan pengumuman, tetapi tidak semua warga membacanya atau memahami rincian penggunaannya.                                    |
| 4  | Apa harapan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa ke depan?                        | Harapannya agar lebih transparan, adil dalam pemerataan pembangunan antar dusun, dan lebih banyak masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. |
| 5  | Apa pendapat Anda tentang hasil pembangunan yang dilakukan dengan Dana Desa?           | Sebagian sudah baik, tapi ada juga proyek seperti jalan desa yang cepat rusak. Perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan fisik.        |

*Sumber: data diolah penulis (2025)*

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada kedua informan pendukung dengan mengajukan pertanyaan umum sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Reduksi Data dan Triangulasi Sumber Informan 6**

| No | Pertanyaan                                                                                           | Jawaban                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana Anda melihat kehadiran pemerintah desa dalam menyampaikan laporan kegiatan secara terbuka? | Masih minim. Laporan memang dibuat, namun tidak disosialisasikan secara luas. Sebagian masyarakat tidak memahami isi dari laporan tersebut karena tidak ada penjelasan langsung. |
| 2  | Seberapa besar peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa?                               | Masih lemah. Warga tidak tahu bagaimana mengawasi atau ke mana harus menyampaikan keluhan. Tidak ada forum khusus untuk pelaporan atau feedback masyarakat.                      |
| 3  | Apakah Anda pernah diundang atau ikut dalam forum musyawarah desa?                                   | Pernah sekali, namun tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Umumnya hanya mendengarkan saja.                                                                 |
| 4  | Apa yang menjadi keinginan utama warga terhadap pengelolaan Dana Desa?                               | Ingin keterlibatan lebih besar dari semua kalangan, bukan hanya tokoh tertentu. Selain itu, masyarakat ingin melihat hasil nyata yang merata dan tepat sasaran di seluruh dusun. |
| 5  | Menurut Anda, apakah pemerintah desa sudah bertanggung jawab atas penggunaan dana desa?              | Bertanggung jawab secara administratif, tapi belum menyentuh rasa keadilan dan kepuasan masyarakat secara menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan.         |

*Sumber: data diolah penulis (2025)*

**Tabel 4.8**  
**Reduksi Data dan Triangulasi Sumber Informan 7&8**

| No | Pertanyaan                                                                        | Jawaban                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana Anda menilai transparansi pemerintah desa terkait penggunaan Dana Desa? | <b>Informan 7:</b> Cukup terbuka, tetapi informasi detail sulit dimengerti.<br><b>Informan 8:</b> Belum pernah ada penjelasan langsung, hanya melihat papan informasi di kantor desa. |
| 2. | Apakah pembangunan yang dilakukan sudah merata di semua dusun?                    | <b>Informan 7:</b> Belum, ada dusun yang jarang mendapat proyek besar.<br><b>Informan 8:</b> Harapannya semua dusun mendapat perhatian yang sama.                                     |
| 3. | Apakah Anda pernah diundang dalam musyawarah desa?                                | <b>Informan 7:</b> Pernah sekali, tapi hanya mendengarkan.<br><b>Informan 8:</b> Belum pernah diundang.                                                                               |
| 4. | Bagaimana kualitas hasil pembangunan?                                             | <b>Informan 7:</b> Sebagian baik, tapi ada jalan yang cepat rusak.<br><b>Informan 8:</b> Positif, meski belum semua kebutuhan terpenuhi.                                              |
| 5. | Apa harapan Anda ke depan terkait pengelolaan Dana Desa?                          | <b>Informan 7:</b> Lebih banyak melibatkan warga dalam pengawasan.<br><b>Informan 8:</b> Pemerataan pembangunan dan penjelasan yang mudah dipahami.                                   |

*Sumber: data diolah penulis (2025)*

#### 4.1.4 Data Display

##### 4.1.4.1 Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di desa Kelising

**Tabel 4.9**  
**Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa**

| No | Pertanyaan                                                                                                                 | Informan             | Jawaban                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa? | Kepala Desa          | Melalui musyawarah dengan masyarakat dan pemasangan papan informasi (APBDes) di beberapa titik di desa.                                               |
|    |                                                                                                                            | Sekretaris Desa      | Menyampaikan informasi melalui media sosial dan baliho/papan transparansi anggaran.                                                                   |
|    |                                                                                                                            | Bendahara Desa       | Memasang spanduk dan papan informasi keuangan di kantor desa dan area publik agar masyarakat mengetahui penggunaan dana dan mencegah penyimpangan.    |
|    |                                                                                                                            | Tokoh Masyarakat (2) | Informasi ada, tapi tidak disosialisasikan secara langsung. Banyak warga tidak memahami isi laporan karena tidak ada penjelasan dari pemerintah desa. |
| 2  | Apakah ada program Musrenbangdes dan bagaimana pelaksanaannya?                                                             | Kepala Desa          | Musrenbangdes dilaksanakan setiap awal tahun dan melibatkan masyarakat untuk menyampaikan usulan.                                                     |
|    |                                                                                                                            | Sekretaris Desa      | Musrenbangdes merupakan SOP desa, dilaksanakan di awal tahun, paling lambat bulan Maret.                                                              |
|    |                                                                                                                            | Tokoh Masyarakat (1) | Umumnya hanya dihadiri tokoh tertentu dan perangkat desa. Masyarakat umum                                                                             |

|   |                                                                                                |                      |                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                |                      | kurang dilibatkan secara aktif dalam forum tersebut.                                                                                   |
| 3 | Bagaimana pemerintah desa mengakomodir usulan dari masyarakat?                                 | Kepala Desa          | Menampung dan mempertimbangkan usulan masyarakat untuk dijadikan panduan dalam penyusunan RKPD dan APBDes.                             |
|   |                                                                                                | Sekretaris Desa      | Usulan disusun dalam RKPDdes dan disesuaikan dengan sumber dana (ADD, Dana Desa, BHP).                                                 |
| 4 | Bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik yang didanai dari Dana Desa?                           | TPK                  | Berdasarkan prioritas usulan masyarakat, tetapi sering terkendala cuaca dan akses distribusi material yang sulit.                      |
|   |                                                                                                | Tokoh Masyarakat (1) | Sebagian pembangunan sudah baik, namun belum merata dan ada infrastruktur seperti jalan desa yang cepat rusak.                         |
| 5 | Bagaimana teknis pengawasan dan koordinasi kegiatan pembangunan?                               | TPK                  | Pengawasan dilakukan harian dan berkala. Koordinasi dengan perangkat desa melalui rapat mingguan dan pelaporan ke Kepala Desa dan BPD. |
|   |                                                                                                | Sekretaris Desa      | Masyarakat, lembaga desa, dan APIP ikut serta mengawasi jalannya kegiatan pembangunan desa.                                            |
| 6 | Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa? | Kepala Desa          | Masyarakat terlibat dalam pengusulan dan pelaksanaan melalui padat karya tunai.                                                        |
|   |                                                                                                | Sekretaris Desa      | Partisipasi masyarakat sangat baik, dibuktikan dengan keikutsertaan dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan.                         |
|   |                                                                                                | Tokoh Masyarakat (2) | Belum tersedia forum pelaporan yang jelas, masyarakat tidak tahu ke mana menyampaikan keluhan terkait pengawasan.                      |

|   |                                                                                  |                      |                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa?                 | Bendahara Desa       | Pelaporan dilakukan sesuai prosedur dan menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes). Laporan disampaikan secara berkala. |
|   |                                                                                  | Kepala Desa          | Laporan disusun dalam bentuk dokumen anggaran, realisasi pendapatan dan biaya, dilaporkan setiap periode tertentu.        |
| 8 | Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dana Desa? | Sekretaris Desa      | Perubahan regulasi yang mendadak kadang tidak sesuai dengan rencana awal sehingga memerlukan penyesuaian dalam anggaran.  |
|   |                                                                                  | TPK                  | Tantangan teknis seperti cuaca dan kondisi geografis mempersulit pelaksanaan di lapangan.                                 |
|   |                                                                                  | Tokoh Masyarakat (2) | Sosialisasi dan forum pelaporan masyarakat belum tersedia sehingga warga sulit memberikan masukan atau pengawasan.        |

*Sumber: data diolah peneliti (2025)*

#### 4.1.4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa Kelising

**Tabel 4.10**  
**Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa**

| No | Kategori          | Uraian                                                                                                                                           | Sumber Informasi                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Faktor Pendukung  | Adanya SOP Musrenbangdes yang rutin dilaksanakan setiap awal tahun.                                                                              | Kepala Desa, Sekretaris Desa      |
| 2  | Faktor Pendukung  | Tingginya partisipasi masyarakat dalam usulan kegiatan dan keterlibatan dalam program padat karya tunai.                                         | Kepala Desa, Sekretaris Desa, TPK |
| 3  | Faktor Pendukung  | Sistem pelaporan yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Siskeudes, memudahkan akuntabilitas dan pencatatan keuangan.                            | Bendahara Desa                    |
| 4  | Faktor Pendukung  | Koordinasi antar perangkat desa berjalan melalui rapat mingguan dan evaluasi rutin.                                                              | TPK, Kepala Desa                  |
| 5  | Faktor Penghambat | Faktor cuaca dan geografis yang menyulitkan pelaksanaan pembangunan fisik (akses distribusi material, kondisi medan).                            | TPK                               |
| 6  | Faktor Penghambat | Masih kurangnya penyampaian informasi secara langsung dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai laporan anggaran dan kegiatan.                   | Tokoh Masyarakat (2)              |
| 7  | Faktor Penghambat | Perubahan peraturan atau regulasi yang mendadak menyebabkan perlunya penyesuaian dalam perencanaan dan anggaran yang sudah dirancang sebelumnya. | Sekretaris Desa                   |
| 8  | Faktor Penghambat | Minimnya forum khusus untuk pengawasan masyarakat atau pelaporan keluhan, menyebabkan kontrol sosial masyarakat menjadi lemah.                   | Tokoh Masyarakat (2)              |

*Sumber: data diolah peneliti (2025)*

## 4.2 Hasil Dan Pembahasan Penelitian

### 4.2.1. Hasil Penelitian

1. Kinerja Pemerintah Desa Kelising dalam Pengelolaan Dana Desa
  - a. Administrasi Pengelolaan: Pemerintah Desa Kelising telah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai tahap yang ditetapkan (perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban). Penyerapan dana secara administratif tercapai 100%.
  - b. Pelaksanaan Fisik dan Program: Kegiatan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan jembatan telah berjalan, namun beberapa hasil di lapangan dinilai kurang optimal oleh masyarakat, terutama dari sisi kualitas dan keberlanjutan.
  - c. Partisipasi dan Musyawarah: Musyawarah perencanaan desa berjalan, namun partisipasi masyarakat rendah—dominan dihadiri oleh tokoh tertentu dan perangkat desa saja.
  - d. Partisipasi dan Musyawarah: Musyawarah perencanaan desa berjalan, namun partisipasi masyarakat rendah—dominan dihadiri oleh tokoh tertentu dan perangkat desa saja.
  - e. Partisipasi dan Musyawarah: Musyawarah perencanaan desa berjalan, namun partisipasi masyarakat rendah—dominan dihadiri oleh tokoh tertentu dan perangkat desa saja.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

**Tabel 4.10 Faktor Pendukung dan Penghambat**

| <b>Faktor Pendukung</b>                               | <b>Faktor Penghambat</b>                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Adanya perangkat desa yang memahami tugas             | Kompetensi SDM desa belum merata                       |
| Pedoman dan aplikasi pelaporan desa (misal Siskeudes) | Keterbatasan akses informasi regulasi bagi warga       |
| Komitmen aparatur untuk pelaksanaan tugas             | Fungsi pengawasan belum optimal dan partisipasi kurang |
| Beberapa sarana umum telah dibangun                   | Keterbatasan dana tambahan dan faktor geografis        |

### 4.2.2 Pembahasan

#### 1. Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kinerja pemerintah desa secara administratif sudah cukup baik, terbukti melalui capaian serapan dana dan kelengkapan pelaporan. Namun, kinerja tersebut belum sepenuhnya tercermin pada hasil pembangunan fisik maupun kepuasan penerima manfaat di masyarakat. Terdapat gap antara data administrasi (yang rapi dan sesuai aturan) dengan kondisi nyata berupa kualitas infrastruktur yang masih dipersoalkan warga.

## 2. Implementasi Prinsip Good Governance

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas masih bersifat formalistik—informasi keuangan dan laporan tersedia, namun belum mudah diakses publik. Akibatnya, masyarakat belum merasa dilibatkan dan tidak mengetahui secara detail penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat pun rendah, musyawarah lebih banyak dihadiri perangkat internal, sehingga aspirasi tidak sepenuhnya terakomodir.

## 3. Faktor Kunci Sukses dan Hambatan

Dukungan regulasi, aplikasi administrasi, dan komitmen aparatur menjadi modal dasar pengelolaan yang efektif. Namun, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal masih menjadi penghambat utama peningkatan kualitas hasil pembangunan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Faktor geografis juga menambah tantangan distribusi dan akses layanan pembangunan di desa.

## 4. Implikasi dan Potensi Perbaikan

Kinerja pemerintah desa perlu ditingkatkan tidak hanya dalam sisi pelaporan, namun juga dalam kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan fisik (infrastruktur), publikasi seluruh proses dan hasil kepada masyarakat, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi. Perlu pelatihan rutin bagi aparatur desa, strategi komunikasi publik yang lebih terbuka, dan penguatan forum-forum partisipatif.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pemerintah Desa Kelising dalam pengelolaan Dana Desa, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, informan pendukung, dan informan masyarakat, kinerja Pemerintah Desa Kelising dalam pengelolaan Dana Desa secara administratif sudah cukup baik. Proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah mengikuti prosedur yang berlaku, serta menggunakan aplikasi Siskeudes untuk mendukung akuntabilitas. Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) rutin dilaksanakan setiap awal tahun dan menjadi wadah pengusulan kegiatan. Namun, partisipasi masyarakat umum dalam forum ini masih rendah karena dominasi tokoh tertentu dan perangkat desa. Dari sisi pelaksanaan, sebagian pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan telah terlaksana sesuai prioritas, tetapi kualitas beberapa infrastruktur dinilai kurang optimal dan belum merata di seluruh dusun. Transparansi informasi anggaran tersedia melalui papan informasi dan media sosial, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat karena minimnya sosialisasi langsung.

2. Faktor pendukung yang memperkuat pengelolaan Dana Desa di Desa Kelising antara lain:

(a) adanya SOP Musrenbangdes yang dilaksanakan rutin setiap tahun,

- (b) komitmen aparat desa dalam menjalankan tugas,
- (c) partisipasi masyarakat melalui program padat karya tunai,
- (d) penggunaan aplikasi Siskeudes yang mempermudah pencatatan dan pelaporan,
- (e) koordinasi rutin antarperangkat desa melalui rapat mingguan.

Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi meliputi:

- (a) rendahnya partisipasi masyarakat umum dalam forum musyawarah dan pengawasan,
- (b) keterbatasan penyampaian informasi secara langsung dan jelas kepada seluruh warga,
- (c) faktor geografis dan cuaca yang menyulitkan pelaksanaan pembangunan fisik,
- (d) adanya perubahan regulasi yang mendadak sehingga memerlukan penyesuaian rencana, serta
- (e) belum optimalnya forum khusus untuk pelaporan atau penyampaian keluhan masyarakat.

## **5.2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Desa Kelising dalam pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Peningkatan Kapasitas SDM

Melaksanakan pelatihan, pembinaan berkala, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam administrasi, komunikasi publik, dan pelibatan warga.

2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Memperluas publikasi laporan penggunaan dana secara terbuka, seperti pemasangan papan informasi, pengumuman publik, serta pemanfaatan media sosial atau aplikasi desa sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan penggunaan dana desa secara real time.

3. Penguatan Sistem Pengawasan

Memaksimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kelompok masyarakat dalam proses pengawasan internal dan eksternal, serta membangun mekanisme pelaporan keluhan yang mudah dan responsif.

4. Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kebutuhan Riil

Prioritaskan program pembangunan berdasarkan kebutuhan aktual dan hasil pemetaan bersama masyarakat, serta lakukan evaluasi rutin terhadap setiap proyek fisik dan nonfisik untuk menilai efektivitas dan dampaknya.

5. Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kebutuhan Riil

Prioritaskan program pembangunan berdasarkan kebutuhan aktual dan hasil pemetaan bersama masyarakat, serta lakukan evaluasi rutin terhadap setiap proyek fisik dan nonfisik untuk menilai efektivitas dan dampaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Valuta*, 2.
- Baihaqi, B. Sari, R. P., & Asmawati, S. (2017). Proses perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Akuntansi*, 7 nomor 1.
- Damayanti, R., Hanafi, A., & Cahyadi, A. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Karyawan Non Medis RS. Islam Siti Khadija Palembang). *Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*.
- Endah, K. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2.
- Fanani, A. F., Astuti, W., Wahyono, D., & Suprpto. (2019). Analisis Undang-Undang Desa. *Dialektika*, 4.
- Fauzia, F. & Nurwahida, N. (2019). Strategi Penetapan Harga Jual dan Penawaran Dalam Perspektif Syariah Toko Sinar Rahmat Kecamatan Sinjai Utara. *Asy-Syarikah*, 1. <http://journalasy-syarika.iaims.ac.id>
- Febiandriani, F. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fitri, F. (2015). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*.

- Ginting, I. M., Bangun, T. A., Munthe, D. V., & Sihombing, S. (2019). Pengaruh Disiplin Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT PLN (Unit Induk Pembangunan Sumatra Bagian Utara). *Manajemen*, 5. <http://ejournal.imiimedan.net>
- Gozali, R., & Hari, K. K. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat). 2 nomor 2.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Ilmu Pendidikan*.
- Hardiyanti, T. H., Indarja, I. & Juliani, H. (2016). Pengelolaan Keuangan di Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Seragen). *Diponegoro Law Journal*, 5.
- Haris, M. (2021). Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Unit Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Krisnanti, N. N. P., Padnyawati, K. D., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karang Asem. Universitas Hindu indonesia, fakultas Ekonomi,Bisnis dan Pariwisata.
- MA, A. R. T. P. (2014). Selayang Pandang Tanah Kaloling Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Kamis, 17 Juli.

- Martana, S. P. (2016). Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakuler Di Indonesia [Institut Teknologi Bandung]. <https://doi.org/http://www.petra.ac.id/-puslit/journals/dir.php?DepartementID=ARS>
- Mubarok, F. K., & Annisak, F. L. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubung Kabupaten Grobongan. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 4.
- Muslim, N., & Nasution, I. (2014). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan. Pemerintahan Dan Sosial Politik, 2.
- Prabowo, P. A. S., & Nurdhiana, N. (2012). Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Akunting Pada Kantor Konsultan Pajak Pakar Penata Usaha Periode 2012.

# *LAMPIRAN*

***Lampiran 1. Pedoman Wawancara***

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?
2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?
3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?
4. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
5. Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?
6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?
7. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?
2. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?
3. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa?
4. Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
5. Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan sebagainya?

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?
3. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?
4. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?
5. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?
6. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?

Nama :

Jabatan :

1. Seperti apa kualitas layanan pegawai desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah kualitas layanan si Desa Kelising Kecamatan Sekatak disini cukup baik?
3. Sejauh mana kinerja pegawai desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat?
4. Sejauh mana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?
5. Sejauh mana responsivitas (kemampuan) aparat Desa Kelising Kecamatan Sekatak dalam menjalankan tujuan dan fungsinya?
6. Seperti apa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja aparat Desa Kelising Kecamatan Sekatak?
7. Seperti apa pertanggungjawaban yang dimiliki aparat desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak?
8. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?
9. Apakah setiap tindakan aparat desa sudah mempertanggungjawabkan wewenangnya?
10. Dalam hal penggunaan dana desa, apa peran masyarakat setempat?
11. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?
12. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?

## ***Lampiran 2. Hasil Wawancara***

### **Pertanyaan untuk kepala Desa**

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?

Jawab: Peran pemerintah dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana desa dilakukan dengan melaksanakan musyawarah yang melibatkan masyarakat serta pemasangan transparansi APBDes di beberapa titik di desa Kaloling.

2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?

Jawab: Program Musrenbangdes selalu dilaksanakan setiap tahun pada awal-awal bulan. Dimana dalam forum musyawarah tersebut melibatkan masyarakat. Dalam program musrenbangdes pemerintah desa menjelaskan perencanaan pengelolaan dana desa yang nantinya akan dilaksanakan. Pemerintah desa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah kelancaran pengelolaan dana desa.

3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?

Jawab: Biasanya pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes dilakukan pada bulan

4. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawab: Peran pemerintah desa dalam mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah yaitu menampung segala apresiasi serta saran atau usulan dari masyarakat. Usulan tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi panduan kami dalam penyusunan RKPD. Nantinya juga akan menjadi dasar penyusunan APBDes.

5. Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?

Jawab: Dalam hal pelaksanaan atau pengawasan setiap kegiatan dalam desa yang terlibat langsung adalah tim pelaksana (TPK) yang mana tim ini dibentuk di desa sebagai pelaksana kegiatan. Tugas TPK mengelola keuangan menjadi bagian penting dalam pembangunan sarana prasarana desa, contohnya pembangunan jalan. Pembentukan TPK sebagai pembantu kaur dan kasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan anggaran.

6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Dalam hal tingkat partisipasi masyarakat terkait perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, masyarakat terlibat sebagai salah satu wadah sebagaimana masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan dana desa sebagai bentuk penunjang kelancaran dengan memberikan usulan usulan yang nantinya akan disaring untuk menjadi sebagai pedoman dalam perencanaan pengelolaan dana desa.

7. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Sejauh ini tidak terdapat kendala yang ditemui dalam proses realisasi perencanaan alokasi dana desa, dikarenakan sebelum memulai kegiatan ataupun realisasi perencanaan tersebut telah diadakan sebuah musyawarah yang mana masyarakat juga terlibat dalam musyawarah ini seperti kepala dusun dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

8. Bagaimana tingkat pelaporan dari pemerintah desa terkait kegiatan anggaran desa.

Jawab: Laporan keuangan yang berbentuk dokumen yang berisi catatan anggaran yang terdiri dari penggunaan dana desa seperti pembayaran termasuk realisasi pendapatan dan biaya. Pelaporan ini biasanya dilakukan pada periode tertentu.

### **Pertanyaan untuk sekretaris Desa**

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?

Jawab: Pemerintah desa melaksanakan pengumuman atau penyampaian kepada masyarakat baik melalui media online seperti facebook ataupun memasang baliho dan papan transparansi anggaran pengelolaan alokasi dana desa.

2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?

Jawab: Musrenbangdes atau forum musyawarah dalam pembahasan pengelolaan dana desa setiap tahunnya mesti kita lakukan karna hal tersebut merupakan SOP dari perencanaan sebuah desa.

3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?

Jawab: Musrenbangdes dilaksanakan diawal tahun berjalannya suatu kegiatan pemerintahan desa dan biasanya paling lambat dilakukan di bulan Maret tahun berjalan.

4. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawab: Pemerintah desa mengakomodir segala masukan dan saran-saran dari peserta musyawarah untuk diwujudkan dalam sebuah RKPDes dan disinkronkan dengan anggaran yang ada di desa baik dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa maupun BHP.

5. Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?

Jawab: Dalam pemerintahan desa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan pembangunan yang ada di desa secara umum dan utama

yaitu masyarakat desa itu sendiri, kemudian lembaga lembaga yang ada dan tim auditor dalam hal ini APIP.

6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya desa Kaloling sangat baik dibuktikan dengan setiap dilaksanakannya baik Musrenbangdes ataupun pelaksanaan kegiatan pembangunan. Masyarakat sangat berperan aktif dalam kegiatan musyawarah maupun kegiatan pembangunan.

7. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Terkadang ada aturan yang tiba-tiba berubah dan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada tahap perencanaan sehingga terpaksa diadakan perubahan anggaran.

### **Pertanyaan untuk Bendahara Desa**

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawab: Melalui transparansi seperti pemasangan spanduk transparansi yang diletakkan di beberapa titik seperti di depan kantor desa dan depan masjid dusun Bainang. Transparansi yang dimaksud disini adalah dengan terbuka menyusun penggunaan dana desa kepada masyarakat. Transparansi dilakukan agar terhindar dari berbagai kecurangan dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan.

2. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?

Jawab: Terkait prinsip transparansi, pemerintah melakukan musyawarah dengan menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga) dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah terhadap ketentuan yang berlaku dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.

3. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa?

Jawab: Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa yaitu dengan kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

4. Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

Jawab: Terkait dengan pertanggungjawaban administrasi tidak terdapat kendala apapun dari pemerintah desa untuk sejauh ini.

5. Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan sebagainya?

Jawab: proses pencatatan melalui jalur struktural yang sebagaimana telah ditentukan. Dimana laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi yang berdasar pada kas sementara laporan operasionalnya menggunakan basis akuntansi akrual. Laporan realisasi menyajikan kegiatan keuangan Pemerintah Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran desa.

### **Pertanyaan untuk Tim Pengelola**

1. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Melakukan Musdus dengan melibatkan masyarakat dusun sampai tingkat desa. Perencanaan ini merupakan tahap pertama dari proses pengelolaan dana desa. Dimana perencanaan ini merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDDes.

2. Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?

Jawab: pembangunan telah direalisasikan dan pada dasarnya sesuai dengan perencanaan yang ada, namun masih terdapat celah dalam kualitas implementasi dan kesesuaian terhadap kebutuhan riil masyarakat yang perlu menjadi perhatian ke depan.

3. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?

Jawab: Sejauh ini kami selaku aparat pemerintah desa tidak menemukan kendala 4. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?

Jawab: Pelaksanaan anggaran sejauh ini sudah dilaksanakan dengan tertib

5. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?

Jawab: Sejauh ini tidak ada tantangan yang dialami dalam implementasi pengelolaan dana desa

6. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?

Jawab: Keterbukaan telah diterapkan dan dilakukan oleh aparat desa terkait pengelolaan dana desa

### **Pertanyaan untuk pegawai kantor Desa**

1. Seperti apa kualitas layanan pegawai desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak?

Jawab: Kualitas layanan pegawai di Desa Kelising Kecamatan Sekatak dari unsur masyarakat anggapannya pelayanan yang didapat sudah baik namun kami tetap berusaha agar pelayanan semakin di tingkatkan agar semakin baik.

2. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah kualitas layanan si Desa Kelising Kecamatan Sekatak disini cukup baik?

Jawab: Dari segi anggapan masyarakat atau masukanmasukan dari masyarakat menjelaskan bahwa kualitas pelayanannya sudah termasuk cukup baik

3. Sejauh mana kinerja pegawai desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat?

Jawab: Terkait masalah kinerja pegawai Desa Kelising Kecamatan Sekatak itu sendiri. Kinerja pegawai Desa Kelising bertugas melayani masyarakat biasanya melalui usulan atau informasi dari kepala desa bilamana masyarakat setiap dusun ingin melakukan pengurusan atau suatu hal yang disampaikan melalui kepala desa yang nantinya akan disampaikan ke aparat desa.

4. Sejauh mana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawab: Pengelolaan dana desa di desa kelising menggunakan papan transparansi. Jadi semua pengelolaan dana desa baik dari pemerintahan dibuatkan papan transparansi sehingga semua masyarakat bisa mengetahui semua hal seperti jumlah pengelolaan dana desa, pembangunan yang akan dilaksanakan.

5. Sejauh mana responsivitas (kemampuan) aparat Desa Kelising dalam menjalankan tujuan dan fungsinya?

Jawab: Terkait kemampuan, sebagai aparat desa selalu mengupayakan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat desa.

6. Seperti apa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja aparat desa Kelising?

Jawab: Setiap kerja tentunya memiliki hambatan, seperti masalah kinerja hambatannya yaitu sebagai contoh permintaan yang belum bisa dipenuhi biasanya aparat desa mengundurkan waktu yang diminta oleh kabupaten, contohnya suatu laporan. Hal tersebut yang biasanya menjadi penghambat pekerjaan di kantor desa.

7. Seperti apa pertanggungjawaban yang dimiliki aparat desa di Desa Kelising Kecamatan Sekatak?

Jawab: pertanggungjawaban yang dimiliki kantor desa itu terkait pelaporan tiap tahunan di kantor desa seperti ADD terdapat pertanggungjawaban yaitu laporan ADD. Dan biasanya laporan tersebut akan diserahkan ke kecamatan bahkan kabupaten.

8. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?

Jawab: Masalah keterbukaan telah di terapkan dengan menyediakan papan transparansi yang dipasang di beberapa titik lokasi, seperti sdi depan kantor desa dan setiap dusun di desa kelising.

9. Apakah setiap tindakan aparat desa sudah mempertanggungjawabkan wewenangnya?

Jawab: Aparat desa sejauh ini telah mempertanggungjawabkan wewenangnya dan akan terus mempertahankan melakukan yang terbaik.

10. Dalam hal penggunaan dana desa, apa peran masyarakat setempat?

Jawab: Dalam penggunaan dana desa peran masyarakat yaitu membantu pemerintah desa dengan melanjutkan program kerja yang dilaksanakan desa seperti melaksanakan gotong royong.

11. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?

Jawab: Anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib.

12. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?

Jawab: Tantangannya yaitu bilamana ada masyarakat desa yang selalu mempertanyakan pengelolaan dana desa. Namun aparat desa selaku melakukan keterbukaan terkait implementasi pengelolaan dana desa.

### **Pertanyaan untuk masyarakat**

1. Seperti apa kualitas layanan pegawai desa di Desa Kelising ?

Jawab: Kualitas layanan di Desa Kelising sudah baik karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Setiap urusan yang dilakukan masyarakat diselesaikan dengan tepat waktu oleh pegawai desa.

2. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah kualitas layanan di Desa Kelising disini cukup baik?

Jawab: Kualitas layanan di desa Kelising sudah cukup baik dan sudah memuaskan juga sejauh ini.

3. Sejauh mana kinerja pegawai desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat?

Jawab: Pegawai Desa Kelising menurut pendapat masyarakat terkait pelayanannya sudah bagus.

4. Sejauh mana kinerja aparat desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawab: Aparat desa selalu menerapkan sistem keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa kepada masyarakat dengan memasang papan informasi terkait realisasi dana desa

5. Sejauh mana responsivitas (kemampuan) aparat Desa Kelising dalam menjalankan tujuan dan fungsinya?

Jawab: Sejauh ini aparat Desa Kelising telah menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam hal pelayanannya.

6. Seperti apa pertanggungjawaban yang dimiliki aparat desa di Desa Kelising?

Jawab: Jika terjadi sebuah kesalahan dalam pengerjaannya, dengan cepat aparat desa akan memperbaiki atau menindaklanjuti hal tersebut.

7. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?

Jawab: Aparat desa sudah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa dengan menyediakan papan informasi.

8. Apakah setiap tindakan aparat desa sudah mempertanggungjawabkan wewenangnya?

Jawab: Setiap tindakan yang dilakukan aparat desa sejauh ini selalu dipertanggungjawabkan.

9. Dalam hal penggunaan dana desa, apa peran masyarakat setempat?

Jawab: Masyarakat seringkali ikut serta dalam hal membantu kelangsungan dan kelancara pembangunan yang dilakukan oleh desa.

10. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?

Jawab: Anggaran dana desa sudah dilakukan dengan tertib.

***Lampiran 3. Daftar Informan*****Informan 1**

Nama : Armansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Desa

**Informan 2**

Nama : Yalik

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Desa

**Informan 3**

Nama : Alung

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Bendahara/Kaur Keuangan

**Informan 4**

Nama : Rensi Alfonita

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kaur Perencanaan

**Informan 5**

Nama : Reky Setiawan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasi Pemerintahan

**Informan 6**

Nama : Syakir

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Dusun

**Informan 7**

Nama : Andi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

**Informan 8**

Nama : Maria Lestari

Jenis Kelamin : Perempuan

***Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian***





